

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian gagasan penulis mengenai Teori Kelas Karl Marx dan kritik atas problematika oligarki di Indonesia, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Teori Kelas sebagaimana digagas oleh Marx merupakan fenomena pembagian dua kelas dalam tatanan sosial masyarakat yang tidak bisa disangkal hingga hari ini. Perkembangan suatu negara adalah hasil pertentangan antarkelas. Ada kelas atas dan kelas bawah. Penghapusan kelas adalah hanya sebatas cita-cita utopis belaka. Upaya untuk membangun kesadaran akan ketertindasan oleh kelas atas masih relevan dibicarakan hingga hari ini, karena diskriminasi dan kesenjangan sosial masih terjadi. Revolusi belum tiba pada titik puncak dan perlu terus diperjuangkan. Corak kehidupan material memungkinkan pengendalian terhadap kehidupan sosial, politik dan spiritual pada umumnya. Oleh karenanya, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan, tetapi, keadaan manusialah yang menentukan kesadaran. Kesadaran manusia adalah produk materialis. Perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi akan selalu hadir sebagai pengandali mutlak dan memengaruhi kesadaran manusia. Kegiatan ekonomi hadir sebagai *basis* yang memengaruhi tatanan sosial atau kesadaran manusia (yang adalah *überbau*).

Kedua: Sejauh negara tidak dikuasai oleh seluruh masyarakat, melainkan hanya oleh sekelompok kelas, entah kelas politik atau ekonomi atau bahkan yang kelas lainnya, maka bagaimana pun negara akan tetap merupakan negara kelas. Konsekuensi dari realitas ini

menyangkali eksistensi gagasan atau konsep negara Hegel, yakni sebagai suatu entitas yang menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat dan menjadi pendamaian atas konflik kepentingan masing-masing orang sebagai subyek yang egois. Negara pada kenyataannya dikuasai secara langsung oleh kelas-kelas yang secara khas menguasai bidang ekonomi dan dijadikan alat untuk pemenuhan kebutuhan kelompok minoritas. Negara hadir dengan dogma ideologi yang membentuk kesadaran palsu melalui pengajaran-pengajaran moral dan pembagian kerja yang tidak dilakukan oleh kelas atas, tetapi sepenuhnya dibebankan kepada kelompok kelas bawah.

Ketiga: Praktik Oligarki di Indonesia merupakan bentuk konkret sentralisasi kekuasaan oleh kelas pemilik modal dan monopoli kekuasaan sebagai bentuk hasil ‘perselingkuhan politis’ antara penguasa dan pengusaha. Praktik oligarki menempatkan para oligark dan pemerintah sebagai kelas atas yang menguasai sumber produksi dan masyarakat sebagai kelas bawah yang teralienasi dengan kedaulatannya sendiri. Praktik oligarki memunculkan kesenjangan kekayaan yang begitu ekstrem antara pemilik modal yang memiliki akses langsung dengan penguasa dan masyarakat kecil yang diasingkan oleh sistem perpolitikan di negara sendiri. Fenomena ini merupakan bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan mendiskreditkan masyarakat yang secara ideologis disebut sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Mereka yang menguasai sumber materiallah yang menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara, sedangkan masyarakat kecil hanya menikmati ‘ampas’ dari penguasa. Problematika oligarki yang terjadi dari pusat hingga daerah merupakan lambang rapuhnya sistem perpolitikan di Indonesia.

Keempat: Fenomena melemahnya sistem demokrasi dan tidak terbendungnya praktik oligarki hanya akan disikapi apabila setiap masyarakat memiliki kesadaran akan krisis karena eksploitasi sumber daya yang sedang dialami. Menelusuk kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan golongan pemodal dan mengesampingkan hak masyarakat. Selanjutnya

rekonstruksi dan tindakan pemulihan terhadap sistem pemerintahan dilakukan dengan mengoptimalkan sistem politik demokrasi. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai dasar pertimbangan dari segala bentuk kebijakan pemerintah. Membatasi hubungan politis antara para oligark dan penguasa yang menjadi cikal bakal kembang biaknya politik elektoral dan mengembalikan kedaulatan tertinggi kepada masyarakat.

Jika perjuangan Marx mewujudkan kesadaran kelas akibat penindasan dan bermuara pada terbentuknya kediktatoran proletariat dan ide tentang penghapusan kelas untuk menenyapkan kapitalisme, maka untuk konteks sekarang (di Indonesia) dalam berhadapan dengan praktik oligarki maka perlu diusahakan pula tercapainya kesadaran serupa; kesadaran akan kesenjangan sosial antarkelas. Kesadaran yang dibangun dewasa ini harus sampai pada kesadaran akan keterasingan masyarakat atas sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Hanya dengan menyadari keterasingan dan kesenjangan ini, masyarakat dapat memulai melanjutkan gerakan revolusi menuju sebuah pembebasan dan membatasi ruang gerak para oligark di Indonesia yang cenderung mengeksploitasi alam secara berlebihan. Masyarakat harus merebut kembali kekuasaan dengan semakin melek berpolitik, meningkatkan semangat *civil society*, terlibat secara langsung dalam dinamika perpolitikan, dan sebisa mungkin terjun dalam konstelasi politik praktis sebagai pihak-pihak independen yang terlepas dari intervensi partai politik, sehingga mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan logika dan naluri kepemimpinan yang terpusat pada kesejahteraan masyarakat.

5.2 Catatan Kritis

Berhadapan dengan problematika oligarki yang menggerogoti konstelasi politik demokrasi, sentralisasi kekayaan dan preferensi kepentingan persial sekelompok elit politik, sekiranya menjadi suatu catatan evaluatif tersendiri bagi sistem pemerintahan Indonesia.

‘Perselingkuhan politis’ antara kaum oligark beserta kelompok penguasa menjadikan mereka sebagai satu kelompok kelas atas yang memiliki akses kuat untuk mempertahankan sumber daya material dan terus mengembangkannya. Oleh karenanya problematika oligarki di Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk konkret kokohnya sistem kelas yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, konsep negara kelas Karl Marx dalam relevansinya dengan kritik atas problematika oligarki di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan oleh penulis di atas perlu mendapat catatan kritis, antara lain:

Pertama: Sebagaimana Magnis katakan, bahwa usaha untuk menghapus kelas sebagai jawaban atas persoalan kesejahteraan umum, sejak awal mula dicetuskan oleh Karl Marx hingga hari ini, merupakan bentuk cita-cita utopia belaka.¹ Bagaimana pun bentuk usaha dan tindakan pencegahan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat, tidak sekali-kali mengubah eksistensi negara sebagai negara kelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana membangun upaya agar hubungan antarkelas tersebut tidak memberikan dampak buruk yang ekstrem terhadap kelas yang lain. Kendati pun terkesan terlalu memaksa, keberadaan kelas atas tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi atau mengeksploitasi kepentingan atau hak-hak kelas bawah.

Kedua: Problematika atau praktik oligarki di Indonesia bukan merupakan hal baru yang menjadi sebuah kajian dalam hidup perpolitikan di Indonesia. Fenomena tersebut telah mengakar dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepas-pisahkan dengan eksistensi pemerintahan sejak Masa Orde baru hingga hari ini. Menarik bahwa jika pada masa Orde Baru praktik oligarki dikuasai dan dikendalikan oleh otoritas kepemimpinan Soeharto, maka dewasa ini praktik oligarki tidak dapat dikontrol dan dikendalikan oleh siapa pun atau biasa disebut dengan oligarki

¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Op. Cit.*, hal. 354.

liar. Oleh karenanya, praktik oligarki merasuk hampir di semua sistem kehidupan masyarakat; terutama dalam bidang perpolitikan, lewat jual beli kekuasaan dan akses atas pengelolaan sumber produksi. Kelekatan praktik oligarki dengan kehidupan masyarakat, membuat praktik tersebut tidak disadari oleh masyarakat, sehingga upaya untuk membendungnya dinilai belum maksimal. Tidak mengherankan Budi Hardiman menegaskan sistem politik demokrasi Indonesia adalah sistem politik demokrasi dalam moncong oligarki.² Demokrasi tidak lebih dari sekadar stempel yang menyembunyikan praktik politik oligarki, melalui ritual demokrasi yang berlangsung secara sistematis. Masyarakat hadir sebagai pemberi suara (*voters*), selebihnya hanya menjadi penonton.

Ketiga: Wacana optimalisasi Demokrasi sebagai usaha meretas praktik Oligarki di Indonesia bisa dikatakan pula sebagai ‘mimpi siang bolong’ (utopis), karena pemerintah sebagai representasi dari masyarakat selalu memiliki hubungan baik secara pribadi maupun politis dengan para oligark. Bisa dikatakan melemahkan oligarki sama dengan melemahkan sistem pemerintahan, sebab hampir semua pemerintahan dan parpol disokong kehidupannya oleh para oligark. Selama politik elektoral menjadi *trand* dalam perpolitikan di tanah air, maka selama itu pula, para politisi dan para oligarki akan terus berbisnis dan berkolaborasi. Hubungan mutualisme antara kedua kelompok ini menjadikan mereka sebagai kelas yang kuat. Bahkan keterlibatan langsung masyarakat dalam konstelasi politik, pada akhirnya akan tetap terjebak dalam lingkaran ‘perselingkuhan politis’ penguasa dan pengusaha. Sampai titik ini kita dapat melihat bahwa kekuasaan ekonomi menjadi kebutuhan pokok bagi kokohnya sistem pemerintahan (kekuasaan politis); dan kekuasaan politik menjadi jalan pintas mencapai usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan faktor produksi (kekuasaan ekonomis).

² F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki, Op. Cit.*, hal. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Primer

Marx, Karl, And Engels, Frederick, *The Communist Manifesto*, Translated by David Harvey,
London: Pluto Press, 2008.

_____, *Capital, A Critique Of Political Econom, Volume One*, Translated by Ben
Fowkes, New York, Vintage Books, 1976.

_____, and Engels, Frederick, *The German Ideology*, New York: Internasional Publisher,
1947.

Winters, Jeffrey A., *Oligarchy*, New York: Cambridge University Press, 2011.

B. Pustaka Sekunder

Aspinall, Edward and Berenschot, Ward, *Democracy For Sale Pemilihan Umum, Klientelisme
dan Negara Di Indonesia*, Edisius Riyadi (Penerj.), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,
2019.

Baghi, Felix, *Pluralisme, Demokrasi Dan Toleransi*, Maumere: Ledalero, 2012.

Bertens, K., *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2018.

_____, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Danujaya, Budiarto, *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2012

Darmawan, Eko (Penerj.), *Anti Filsafat Metode Pemikiran Marx*, Yogyakarta: Resist Book,
2013.

- E. Priyono, A. dan Hamid, Usman (ed.), ***Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi***, Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Elster, Jon, ***Introduction To Karl Marx***, New York: Cambridge University Press, 1986.
- _____, ***Marxisme: Analisis Kritis***, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2000.
- Engels, ***Ludwig Feuerbach And The End Of Classical German Philosophy***, Stuttgart: Progoss Publishers, 1886.
- Galus, Ben Senang, ***Kuasa Kapitalis Dan Matinya Nalar Demokrasi***, Yogyakarta: Penerbit Beta, 2017.
- Grant, Alam W. Ted., ***Nalar Yang Memberontak Filsafat Marxisme Dan Sains Modern***, Rafiq Nadezhda (Penerj.), Yogyakarta: Resist Book, 2015.
- Hadiz, Vedi R., ***Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto***, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Hamersma, Herry, ***Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern***, Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Hardiman, F. Budi, ***Dalam Moncong Oligarki***, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Jegalus, Norbertus, ***Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif***, Jakarta: Obor, 2011.
- Jebadu, Alexander, ***Bahtera Terancam Karam Lima Masalah Sosial Ekonomi Dan Politik Yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia***, Maumere: Ledalero, 2019.
- Kristeva, Nur Santoso, ***Kapitalisme, Negara dan Masyarakat***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Lefebvre, Henri, ***Marxisme***, A. Arum Candra H. (Penerj.), Yogyakarta: Jalansutra, 2017.
- M. Ramin, Maghfur, ***Teori Kritis Filsafat Lintas Mazhab***, Yogyakarta: Sociality, 2017.

Madung, Otto Gusti, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*, Maumere: Ledalero, 2017.

Mali, Mateus (ed.), *Perjumpaan Pancasila Dan Kristianitas*, Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2009.

Mouffe, Chantal, *The Democratic Paradox*, London: Verso, 2000.

Ramli, Andi M., *Pemikiran Karl Marx*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Richard Robison, *Soeharto Dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Robinson, Richard and Hadiz, Vedi R., *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London: Routledge Curzon, 2004.

Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Ahmad dan Imam (Penerj.), Jakarta: Pustaka Belajar, 2015.

Sen, Amartya, *An Ethics And Economics*, Oxford: Blackwell Publishers, 1988.

Sihotang, Kasdin, *Filsafat Manusia Jendela Minyingkap Humanisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

Magnis-Suseno, Franz *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

_____, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

_____, *Dari Mao Ke Marcuse Percikan Filsafat Marxis Pasca Lenin*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- _____, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Suwarto, Hadi (Penerj.), *Karl Marx Muda Hingga Dewasa: Revolusi 1848 Dan Perkembangan Pemikiran Marx*, Yogyakarta: Penerbit Independen, 2019.
- Tan, Peter, *Paradoks Politik Pertautannya Dengan Agama Dan Kuasa Di Negara Demokrasi*, Yogyakarta: Gunung Sopai, 2018.
- Vaut, Simon, *Buku Bacaan Sosial Demokrasi 2 Ekonomi Dan Sosial Demokrasi*, Ivan A. Hadar (Penerj.), Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2013.
- Watlohy, Aholiab, *Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.

C. Jurnal dan Diktat

- Fowkes, Ben (Penerj.), *Capital, A Critique Of Political Econom, Vol. One*, New York: Vintage Books, 1976.
- Jebadu, Alex, *Politik Ekonomi Pasar Bebas: Neoliberalisme Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba*, (Diktat), Maumere: STFK Ledalero, 2018.
- Suryadi, Budi, *Perkembangan Dan Kegagalan Sistem Politik Di Indonesia*, dalam Jurnal Charta Publika, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2011
- Koalisi #BersihkanIndonesia, *Omibus Law; Kitab Hukum Oligarki, (Riset)* Jakarta:2020.

D. KAMUS

- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarata: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Riff, Mikchael A. *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

E. Pustaka Net

Draft final Omnibus Law UU Cipta Kerja versi 812 halaman
<https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/ruu-cipta-kerja-12-oktober-2020-final.pdf>, diakses
pada 28 April 2021.

Kurniawan, *Mempelajari Teori Ekonomi Dari Para Tokoh Ekonomi Terkenal*, dalam
[https://www.superprof.co.id/blog/ekonomi dan teori terkenal](https://www.superprof.co.id/blog/ekonomi_dan_teoris_terkenal), diakses pada tanggal 2
November 2020.

Marcelo Musto, *Konsep Alienasi (Keterasingan) Dan Sejarahnya*, dalam
[https://indoprogress.com/2018/08/konsep alienasi keterasingan dan sejarahnya](https://indoprogress.com/2018/08/konsep_alienasi_keterasingan_dan_sejarahnya), diakses
pada 29 Oktober 2020.

Wijayanto, “*Oligarki, Ketimpangan Ekonomi dan Imajinasi Politik Kita*”,
[https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/06460031/oligarki-ketimpangan-ekonomi-dan-](https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/06460031/oligarki-ketimpangan-ekonomi-dan-imajinasi-politik-kita?page=all)
[imajinasi-politik-kita?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/06460031/oligarki-ketimpangan-ekonomi-dan-imajinasi-politik-kita?page=all), diakses pada 19 Maret 2021.